

RANCANGAN AWAL RENJA

TAHUN 2025

MAL PELAYANAN PUELIK
KOTA BANDA ACEH

**DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, karena atas perkenan-Nya Rancangan Awal Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banda Aceh Tahun 2025 dapat tersusun dengan baik.

Recana Kerja (Renja) merupakan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, yang tersusun dengan memedomani Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2023-2026. Secara Substansi, dokumen Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2025 memuat hasil evaluasi Renja tahun lalu (n-2), tujuan dan sasaran, serta rencana kerja dan pendanaan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan dan dukungan dalam penyusunan dokumen Rancangan Awal Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banda Aceh Tahun 2025. Semoga Allah SWT senantiasa meridhai kita semua.

Banda Aceh, 24 November 2023
Plt. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu



Andri, S.STP., M.Si

Pembina / NIP. 19840323 200212 1 002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i

DAFTAR ISI ii

EXECUTIVE SUMMARY iii

BAB I PENDAHULUAN 1

1.1. LATAR BELAKANG 1

1.2. LANDASAN HUKUM 2

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN..... 4

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN..... 5

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU..... 6

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu dan Capaian Renstra
Perangkat Daerah..... 6

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah 14

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah 17

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH 19

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional. 19

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah. 19

3.3. Program dan Kegiatan..... 20

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH..... 27

BAB. V PENUTUP..... 34

EXECUTIVE SUMMARY

Rancangan Awal Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun, yang memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai Indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah. Penyusunan berpedoman pada Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Dan sebagai acuan dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota (RAPBK) Kota Banda Aceh yang akan dijabarkan pula dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rencana Kerja Anggaran (RKA) DPMPTSP kota Banda Aceh Tahun 2025.

Berdasarkan RENSTRA DPMPTSP terdapat 6 (enam) Program dan 12 (dua belas) Kegiatan yang direncanakan termuat dalam Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2025. Adapun Program dan Kegiatan tersebut untuk mendukung pencapaian target kinerja yakni jumlah nilai Investasi Kota Banda Aceh sebesar 630,06 Triliun, pencapaian nilai indeks kepuasan masyarakat sebesar 90,77.

Rencana anggaran belanja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu tahun 2025 dialokasikan anggaran sebesar Rp. 8,864,341,476,-, yang terbagi kedalam 6 program, yakni Program Penunjang Urusan Pemerintahan, Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal, Program Promosi Penanaman Modal, Program Pengendalian Penanaman Modal, Program Pelayanan Penanaman Modal, dan Program Pengolahan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG.

Rancangan Awal Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu disusun secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh, dan tanggap terhadap perubahan sesuai dengan amanat Undang – undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya mengacu kepada rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) serta berpedoman kepada Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah dan mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah (RKP), yang didalamnya memuat kebijakan, program, dan kegiatan Pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Selanjutnya dalam Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, menjelaskan tentang Langkah – Langkah dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah. Dalam kedudukannya Rencana Kerja Perangkat Daerah merupakan dasar bagi penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Oleh karena itu sebagai salah satu produk perencanaan daerah, Rencana Kerja Perangkat Daerah strategi jangka menengah dengan perencanaan tahunan yang dilaksanakan oleh Perangkat daerah.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banda Aceh selaku Perangkat Daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 56 Tahun 2016 tentang Susunan, Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banda Aceh. Dalam menyusun Rencana Kerja harus memperhatikan kesesuaian capaian output antar kegiatan dalam satu program maupun dengan program lain, selain itu harus ada keselarasan program dengan issue strategis daerah yang memuat dalam rancangan awal RKPD Kota Banda Aceh.

Penyusunan Rancangan Awal Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan terpadu Satu Pintu tahun 2025 mengacu pada dokumen – dokumen perencanaan yang sudah ada yaitu RPD Kota Banda Aceh tahun 2023 – 2026 dan Renstra DPMPTSP tahun 2023 – 2026 dan mempedomani Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 yaitu Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang hasil verifikasi, validasi dan intervensi pemutakhiran klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah.

Dokumen Rancangan Awal Renja tahun 2025 ini disusun sebagi acuan dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota (RAPBK) kota Banda Aceh yang dijabarkan dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Anggaran (RKA) DPMPTSP kota Banda Aceh Tahun 2025.

1.2. LANDASAN HUKUM

Peraturan perundang-undangan yang melatar belakangi penyusunan Rancangan Awal Renja DPMPTSP kota Banda Aceh Tahun 2024 antara lain sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan yang Bersih dan Bebas Kolusi, Korupsi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 65 tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Nasional;
8. Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
10. Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1995 tentang Kualitas Pelayanan Aparatur Pemerintah Kepada Masyarakat;

11. Instruksi Presiden Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas dan Kinerja Instansi Pemerintah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
17. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara & Reformasi Birokrasi RI Nomor 81 tahun 1993 tentang Pedoman Tata Laksana Pelayanan Umum;
18. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara & Reformasi Birokrasi RI Nomor KEP/24/M.PAN/2004 tentang Petunjuk Teknis Transparansi dan Akuntabilitas dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 yaitu Tetang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang hasil verifikasi, validasi dan intervensi pemutakhiran klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah;
20. Qanun Kota Banda Aceh Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Qanun Kota Banda Aceh Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Banda Aceh Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Kota Banda Aceh Thaun 2016 nomor 2);
21. Qanun Kota Banda Aceh Nomor 4 tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan;

22. Qanun Kota Banda Aceh Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banda Aceh;
23. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Rencana Pembangunan Aceh Tahun 2023 – 2026;
24. Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 56 Tahun 2016 tentang Susunan, Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banda Aceh;
25. Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 116 Tahun 2020 tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banda Aceh.
26. Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 09 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Banda Aceh Tahun 2023-2026;

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dari penyusunan Rancangan Awal Renja DPMPTSP kota Banda Aceh Tahun 2025 adalah menyediakan informasi mengenai rencana kerja tahun 2025 serta sebagai dokumen acuan dalam pelaksanaan kebijakan dan program Pembangunan urusan Penanaman Modal untuk kurun waktu satu tahun secara terencana, terarah, terpadu dan berkesinambungan sesuai dengan Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2023 – 2026 dan Rencana Pembangunan Daerah Kota Banda Aceh (RPD) tahun 2023 – 2026 sebagai arah dan pedoman untuk menjabarkan perencanaan pembangunan pada bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu di kota Banda Aceh selama satu tahun anggaran yaitu tahun 2025 yang dituangkan dalam program dan kegiatan OPD.

Sementara, tujuan dari penyusunan Rencana Awal Renja DPMPTSP kota Banda Aceh Tahun 2025 adalah sebagai bahan koordinasi pelaksanaan kegiatan OPD untuk menunjang pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan kota Banda Aceh sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing OPD dimana tujuan dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah “Mengoptimalkan Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan dan Pertumbuhan Ekono mio Yang Kondusif Melalui Kebijakan Penanaman Modal”,

Dalam penyusunan dokumen Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) kota Banda Aceh tahun 2024. Adapun pencapaiannya dapat dilihat pada capaian Indikator Kinerja Utama(IKU) yang targetnya telah ditetapkan didalam Renstra.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penyusunan Rancangan Awal Renja DPMPTSP kota Banda Aceh Tahun 2024 mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan R

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Adapun sistematika penyusunan Rancangan Awal Renja DPMPTSP Kota Banda Aceh Tahun 2024 disusun menurut sistematika sebagai berikut :

Sistematika Penulisan :

BAB I Pendahuluan

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II Hasil Evaluasi Renja DPMPTSP Kota Banda Aceh Tahun Lalu

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu dan capaian Renstra SKPD
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD
- 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

BAB III Tujuan dan Sasaran DPMPTSP Kota Banda Aceh

- 3.1 Telaahan terhadap kebijakan Nasional
- 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja SKPD
- 3.3 Program dan Kegiatan

BAB IV Rencana Kerja dan Pendanaan DPMPTSP Kota Banda Aceh

- 4.1 Tabel Rencana Kerja, Pendanaan dan Kelompok Sasaran

BAB V Penutup

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah.

Dalam rangka pencapaian target kinerja tahun 2023, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, melaksanakan Evaluasi pelaksanaan Renja yang dilakukan setiap triwulan berdasarkan data realisasi kinerja dan anggaran tahun berjalan. Kepala OPD menyampaikan laporan hasil evaluasi kepada Walikota melalui Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) setiap triwulan dalam tahun anggaran berkenaan, untuk selanjutnya dilakukan evaluasi. Bila berdasarkan hasil evaluasi oleh Bappeda ditemukan adanya ketidak sesuaian/penyimpangan, maka Kepala OPD melakukan tindakan perbaikan/penyempurnaan. Evaluasi dilakukan untuk memastikan bahwa indikator kinerja program dan kegiatan Renja OPD dapat dicapai dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran Renstra OPD, serta sasaran dan prioritas pembangunan tahunan daerah. Kemudian di fokuskan dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) DPMPTSP Kota Banda Aceh tahun 2023 – 2026.

Pada tahun 2023 terjadinya Perubahan anggaran DPMPTSP Kota Banda Aceh dari sebelumnya sebesar Rp. 8.164.818.873,- menjadi Rp. 7.992.313.742,- yang di bagi kedalam 2 (dua) pembelanjaan, yaitu:

- 1) Belanja Operasi (Belanja Pegawai & Belanja Barang dan Jasa) Rp. 7.970.259.742,-
- 2) Belanja Modal (Belanja Modala Peralatan dan Mesin) Rp. 22.054.000,-

Realisasi belanja pada tahun anggaran 2023 s/d Oktober adalah sebesar Rp.6.135.100.855,-

Realisasi pelaksanaan Program dan Kegiatan tahun 2023 adalah sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemeritahan Daerah.

Realisasi Fisik : 69,29% dan Realisasi Keuangan : 79,12% dengan rincian sebagai berikut :

No	Kegiatan	Jlh Anggaran (Rp)	Realisasi			Sisa (Rp)
			Fisik	Realisasi Keuangan		
				%	Rp	
1.	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4.840.935	100	-	-	4.840.935
2.	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.955.136.552	90	4,128,363,680	77,72	1,183,319,480
3.	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	132.795.797	75	99,094,703	74,62	33,697,244

4.	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	22.054.000	00	-	-	22.054.000
5.	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1,468,695,043	95	1,312,633,312	84,99	156,061,731
6.	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	116,370,101	55	41,318,630	35.51	75,051,471

2. Program Promosi Penanaman Modal.

Realisasi Fisik : 0% dan realisasi Keuangan : 0% , dengan rincian sebagai berikut :

No	Kegiatan	Jlh Anggaran (Rp)	Realisasi			Sisa (Rp)
			Fisik	Realisasi Keuangan		
			%	Rp	%	
1.	Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal Yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	-	00,00	-	00,00	-

3. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal

Realisasi Fisik : 30 % dan realisasi Keuangan : 29,88 %, dengan rincian sebagai berikut :

No	Kegiatan	Jlh Anggaran (Rp)	Realisasi			Sisa (Rp)
			Fisik	Realisasi Keuangan		
			%	Rp	%	
1.	Kegiatan Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal Yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	-	00,00	-	00,00	-

4. Program Pelayanan Penanaman Modal.

Realisasi Fisik : 30 % dan realisasi Keuangan : 29,88 %, dengan rincian sebagai berikut :

No	Kegiatan	Jlh Anggaran (Rp)	Realisasi			Sisa (Rp)
			Fisik	Realisasi Keuangan		
			%	Rp	%	
1.	Kegiatan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal yang menjadi kewenangan	17,436,115	70,00	5,210,130	29,88	12,225,985

5. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal.

Realisasi Fisik : 41 % dan realisasi Keuangan : 61,45 %, dengan rincian sebagai berikut :

No	Kegiatan	Jlh Anggaran (Rp)	Realisasi			Sisa (Rp)
			Fisik	Realisasi Keuangan		
			%	Rp	%	

1.	Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten / Kota.	333,900,000	95.00	205,177,400	61.45	128,722,600
----	--	-------------	-------	-------------	-------	-------------

6. Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal.

Realisasi Fisik : 52 % dan Realisasi Keuangan : 51,38 %, dengan rincian sebagai berikut :

No	Kegiatan	Jlh Anggaran (Rp)	Realisasi			Sisa (Rp)
			Fisik	Realisasi Keuangan		
			%	Rp	%	
1.	Kegiatan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Yang Terintegrasi Pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	644,192,000	52.00	331,000,000	51.38	313,192,000

1) Realisasi program dan kegiatan yang memenuhi target kinerja dengan tahun 2023 adalah sebagai berikut;

 Terdapat 10 (Sembilan) kegiatan pada 6 (enam) program yang belum memenuhi target Renja dan Renstra DPMPTSP, yaitu :

- a. Program Penunjang Urusan Pemeritahan Daerah
 - Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (90%)
 - Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah (75,75%)
 - Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penujang Urusan Pemerintahan Daerah (0 %)
 - Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (95%)
 - Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (55%)
- b. Program Promosi Penanaman Modal
 - Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal Yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota (0%)
- c. Porgram Pengembangan Iklim Penanaman Modal
 - Kegiatan Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal Yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota (0%)
- d. Program Pelayanan Perizianan Penanaman Modal
 - Kegiatan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal yang menjadi kewenangan (70%)
- e. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal.

- Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten / Kota (95%)
- f. Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal.
- Kegiatan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Yang Terintegrasi Pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota (52%).
- 2) Realisasi program dan kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
- Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (100%)
- 3) Realisasi program dan kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
- Tidak ada program dan kegiatan yang melebihi target yang telah ditetapkan
- 4) Faktor – faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/ kegiatan/ sub kegiatan;
- Faktor penyebab belum tercapainya target pada beberapa program dikarenakan capaian tahun berjalan belum selesai, dan terjadinya pengalihan anggaran pada kegiatan yang lebih strategis.
- 5) Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah;
- Secara keseluruhan keterkaitan yang timbul dengan pencapaian target capaian program Renstra yang belum sesuai, peningkatan sarana dan prasarana serta SDM untuk mendukung pelayanan secara digitalisas, tidak mempunya secara terus menerus menggali potensi investasi daerah akibat keterbatasan sumber daya, sehingga tidak menemukan potensi unggulan investasi.
- 6) Kebijakan atau Tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor penyebab tersebut;
- Kebijakan atau Tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi keterbatasan anggaran yang berdampak pada keterbatasan kegiatan.

Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra
Perangkat Daerah s/d Tahun 2023 Kota Banda Aceh

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan				Indikator Kinerja Program (outcome) /Kegiatan (output)		Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023-2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program & Keluaran Kegiatan, Sub Kegiatan s/d Tahun 2022 (n-3)		Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2023 (n-2)			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024	
											Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun Berjalan Tahun 2023 (n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
(1)	(2)				(3)		(4)		(5)		(6)	(7)	(8) = (7/6)	(9)	(10) = (5+7+9)	(11) = (10/4)
1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL											7,628,729,312				
2	18	02			Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kab/Kota		100	%	100	%	100%	7,603,606,312		100%	100	%
2	18	02	2.01		Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		100	%	100	%	100%	4,940,123		100%	100	%
2	18	02	2.01	0001	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan yang disusun	9	Dokumen	9	Dokumen	9 Dokumen	4,940,123		9 Dokumen	9	Dokumen
2	18	02	2.02		Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		100	%	100	%	100%	1,831,048,118		100%	100	%
2	18	02	2.02	0001	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah waktu pembayaran gaji dan tunjangan ASN yang disediakan	12	Bulan	12	bulan	12 Bulan	4,924,373,118		12 Bulan	12	Bulan
2	18	02	2.02	0002	Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah waktu Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/ Teknis Perkantoran yang disediakan	12	Bulan	12	bulan	12 Bulan	906,675,000		12 Bulan	12	Bulan
2	18	01	2.05		Kegiatan Administrasi Pengawasan Perangkat Daerah		100	%	100	%	100%	43,835,000		100%	100	%
2	18	01	2.05	0002	Sub Kegiatan Pengadaan Pakalan Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakatan dinas beserta perlengkapannya yang disediakan	0	Stel	0	Stel	0 Stel	43,835,000		0 Stel	0	Stel
2	18	01	2.02		Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah		100	%	100	%	100%	146,988,077		100%	100	%
2	18	01	2.06	0001	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah jenis Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	9	Jenis	9	bulan	9 Bulan	3,463,853		9 Jenis	9	Jenis
2	18	01	2.06	0004	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah jenis Bahan Logistik Kantor yang disediakan	6	Jenis	6	Dokumen	6 Dokumen	17,367,638		6 Jenis	6	Jenis
2	18	01	2.06	0005	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah jenis Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	16	Jenis	16	Dokumen	16 Dokumen	76,156,586		16 Jenis	16	Jenis
2	18	01	2.06	0009	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah yang dilaksanakan	24	Laporan	10	laporan	24 Laporan	50,000,000		24 Laporan	24	Laporan

2	18	03			Program Promosi Penanaman Modal	Persentase Promosi Penanaman Modal	100	%	100	%	100%	20,123,000		100%	100	%
2	18	06	2.03		Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Keunggulan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal	1	Laporan	1	Laporan	1 Laporan	20,123,000		1 Laporan	1	Laporan
2	18	03	2.01	02	Sub Kegiatan Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Keikutsertaan Pameran Investasi	1	kal	1	Kegiatan	1 Kegiatan	20,123,000		1 kali	1	kal
2	18	04			Program Pelayanan Penanaman Modal	Persentase Tingkat Kepuasan Masyarakat	100	%	100	%	100%	-		100%	100	%
2	18	04	2.01		Kegiatan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pita di Bidang Penanaman Modal yang menjadi Keunggulan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Secara Terpadu Satu Pita Dibidang Penanaman Modal	2	Laporan	2	Laporan	2 Laporan	-		2 Laporan	2	Laporan
					Pemantauan pemenuhan komitmen Perizinan dan NonPerizinan Penanaman Modal	Jumlah Laporan pelaku usaha yang sudah memenuhi komitmen Perizinan dan Non Perizinan	0	0	1	laporan	0	0	0	0	0	0
					Penyediaan layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	Jumlah Responden yang mengikuti Survey kepuasan masyarakat	0	0	1	laporan	0	0	0	0	0	0
2	18	04	2.01	0006	Sub Kegiatan Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	Jumlah Pengawasan Tempat Usaha yang Memiliki izin usaha	200	Pelaku Usaha						200 Pelaku Usaha		
2	18	04	2.01	0007	Sub Kegiatan Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan	Jumlah masyarakat yang Dilayani untuk Konsultasi/Pengaduan yang Ditindaklanjuti	500	Masyarakat						500 Masyarakat		
2	18	05			Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Persentase Nilai Penanaman Modal	100	%	100	%	100%	-		100%	100	%
2	18	05	2.01		Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Keunggulan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	1	Laporan	100	%	100%	-		100%	100	%
					Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah laporan pemantauan LKPM	0	0	1	laporan	0	0	0	0	0	0
					Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah laporan pelaku usaha yang telah mendapatkan pembinaan terhadap penyempalan LKPM	0	0	1	laporan	0	0	0	0	0	0
					Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah laporan pengawasan terhadap kepatuhan penyempalan LKPM oleh Investor	-	0	1	laporan	0	0	0	0	0	0
2	18	05	2.01	0004	Sub Kegiatan Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya.	Jumlah Laporan pemantauan	1	Kegiatan Usaha						1 Kegiatan Usaha		
2	18	05	2.01	0005	Sub Kegiatan Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha.	Jumlah Laporan pelaku usaha yang telah mendapatkan pembinaan	1	Pelaku Usaha						1 Pelaku Usaha		
2	18	05	2.01	0006	Sub Kegiatan Pengawasan Penanaman Modal.	Jumlah laporan Pelaksanaan pengawasan Penanaman Modal	1	Kegiatan Usaha						1 Kegiatan Usaha		

2	18	01	2.07		Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Perangkat Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan Barang Milik Daerah Perangkat Urusan Pemerintahan Daerah	100	%	30	%	100%	67,574,982		100%	100	%
2	18	01	2.07	0006	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin lainnya yang disediakan	50	Unit	23	unit	50 Unit	59,537,582		50 Unit	50	Unit
2	18	01	2.07	0010	Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan lainnya yang disediakan	1	Unit	0	unit	1 Unit	8,036,500		1 Unit	1	Unit
2	18	01	2.08		Kegiatan Penyediaan Jasa Perangkat Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan Penyediaan Jasa Perangkat Urusan Pemerintahan Daerah	100	%	80	%	100%	1,177,354,973		100%	100	%
2	18	01	2.08	0002	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah waktu Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air & Listrik	12	Bulan	12	bulan	12 Bulan	1,190,000,000		12 Bulan	12	Bulan
2	18	01	2.08	0004	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah waktu Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12	Bulan	12	bulan	12 Bulan	187,354,973		12 Bulan	12	Bulan
2	18	01	2.09		Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Perangkat Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Perangkat Urusan Pemerintahan Daerah	100	%	30	%	100%	131,866,998		100%	100	%
2	18	01	2.09	0002	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Pemeliharaan, Pembayaran Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	7	Unit	7	unit	7 Unit	43,670,000		7 Unit	7	Unit
2	18	01	2.09	0006	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin lainnya yang dipelihara	59	Unit	59	unit	59 Unit	69,389,474		59 Unit	59	Unit
2	18	01	2.09	0010	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan lainnya	Jumlah gedung kantor dan Bangunan lainnya yang dipelihara/direhab	32	Unit	6	unit	32 Unit	18,806,465		32 Unit	32	Unit
2	18	02			Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Persentase Pengembangan Iklim Penanaman Modal	100	%	0	0	100%	5,000,000		100%	100	%
2	18	02	2.01		Kegiatan Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal	100	%	0	0	100%	2,504,500		100%	100	%
2	18	02	2.01	0001	Sub Kegiatan Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	1	Dokumen	0	0	1 Dokumen	2,504,500		1 Dokumen	1	Dokumen
2	18	02	2.02		Kegiatan Pembuatan Peta Potensi Investasi	Jumlah Pembuatan Peta Potensi Penanaman Modal	100	%	0	0	100%	2,495,500		100%	100	%
2	18	02	2.02	0001	Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota yang dikeluarkan	1	Dokumen	0	0	1 Dokumen	2,495,500		1 Dokumen	1	Dokumen

2	18	06			Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Persentase Peningkatan Sistem Informasi Penanaman Modal	92.25	Nilai	100	%	100%	-		100%	100	%
2	18	06	2.01		Kegiatan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sistem Informasi Perizinan Berbasis Elektronik yang Terintegrasi dengan Sistem Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	100	%	48000	Pelaku Usaha	100%	-		100%	100	%
					Kegiatan Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah pengunjung MPP	0	0	48000	Masyarakat	-	-	0	0	0	0
2	18	06	2.02	0002	Sub Kegiatan Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Sistem Informasi Perizinan Berbasis Elektronik yang Terintegrasi dengan Sistem Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	1	Dokumen						1 Dokumen		

Note:

*Warna Pink adalah Sub Kegiatan pada Tahun 2024

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Capaian kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dapat dihitung berdasarkan capaian target kinerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang telah tertuang dalam Renstra DPMPTSP, dalam Peraturan Walikota Nomor 56 Tahun 2016 tentang Susunan Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan dan Tata kerja DPMPTSP antara lain:

1. melakukan perumusan dan pelaksanaan kebijakan dibidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
2. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan dibidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu. Satu pintu.
3. Menyusun peta potensi investasi kota.
4. Menyelenggarakan promosi penanaman modal.

Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPD) kota Banda Aceh Tahun 2023 – 2026 memuat tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah. Tujuan dan sasaran yang sesuai dengan tugas dan fungsi DPMPTSP kota Banda Aceh terdapat pada RKP yaitu “ Mewujudkan reformasi birokrasi yang berkualitas dan fungsional” dengan sasaran “Meningkatnya tata kelola kelembagaan layanan administrasi pemerintahan serta layanan publik berbasis elektronik” . Adapun strategi dalam pencapaian tujuan dan sasaran tersebut adalah dengan Optimalisasi reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintah. Maka dengan mengacu kepada hal tersebut, dalam Renstra DPMPTSP kota Banda Aceh Tahun 2023 - 2026 yang telah ditetapkan, Indikator Kinerja Utama (IKU) DPMPTSP kota Banda Aceh untuk 5 (lima) tahun mendatang yaitu :

1. Jumlah Nilai Investasi Berskala Nasional PMDN/PMA
2. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

Tabel 2.2.1. Realisasi Capaian Indikator Kinerja Utama

(Kondisi per September 2023)

SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM	TARGET KINERJA SASARAN TAHUN 2023	REALISASI KINERJA SASARAN TAHUN 2023	CAPAIAN TAHUN 2022
Optimalnya Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan pada Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Kondusif Melalui Kebijakan Penanaman Modal.	Jumlah Nilai Investasi Berskala Nasional PMDN/PMA	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	575,27 Milyar	436,915 Milyar	132%
	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Program Pelayanan Penanaman Modal	90,74	93,67	98%
Rata - rata Persentase Realisasi					77%

Capaian jumlah nilai investasi berskala nasional PMDN/PMA sampai pada triwulan ketiga mencapai Rp. 401.456.243.662 triliun dengan realisasi Penanaman Modal Asing (PMA) sebesar Rp. 57.182.603.920 triliun dan realisasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) mencapai Rp. 344.273.639 triliun, dengan jumlah 446 Investor. Capaian kinerja pelayanan DPMPTSP kota Banda Aceh hingga Tahun 2023 yang terkait: Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap penyelenggaraan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu pada semester I tahun 2023 dengan nilai Indeks 93,67 atau berada pada katagori A (Sangat Baik). Selain itu juga, penyelenggaraan perizinan DPMPTSP kota Banda Aceh telah memperoleh penghargaan dari Kementerian PAN & RB yaitu Predikat A untuk unit penyelenggara pelayanan publik kategori pelayanan prima lingkup pemerintah daerah Tahun 2022. Terkait dengan capaian Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) pada tahun 2022 mendapat nilai B, Nilai ini tentunya masih jauh dari target yang ingin dicapai. Untuk itu kerja besar dan kerja keras dari seluruh stakeholders terutama internal sangat diharapkan. Melalui capaian tersebut diharapkan dapat terus meningkatkan kualitas pelayanan perizinan DPMPTSP kota Banda Aceh pada masa yang akan datang.

Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat daerah

NO	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra SKPD				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun (2022)	Tahun (2023)	Tahun (2024)	Tahun (2025)	Tahun (2022)	Tahun (2023)	Tahun (2025)	Tahun (2026)	
(1)	(2)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pada Penanaman Modal dan pelayanan terpadu satu pintu			92.25	90.74	90.75	90.76	92,29	93,67 (kondisi SMT I)	90.76	90.77	
2	Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) pada Penanaman Modal dan pelayanan terpadu satu pintu			CC	CC	B	B	B	-	B	B	
3	Persentase Pengembangan Iklim Penanaman Modal			-	100%	100%	100%	100%	-	100%	100%	
4	Persentase Promosi Penanaman Modal			-	100%	100%	100%	100%	-	100%	100%	
5	Persentase Nilai Penanaman Modal			-	100%	100%	100%	100%	-	100%	100%	

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Berisikan mengenai sejauh mana tingkat kinerja pelayanan Perangkat Daerah dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan Perangkat Daerah, permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyerenggarakan tugas dan fungsi serta pencapaian tujuan, sasaran, strategis dan arah kebijakan berdasarkan Rencana Pembangunan Daerah (RPD).

Salah satu tugas pokok Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yaitu melakukan pelayanan publik dibidang pelayanan perizinan. Dalam rangka peningkatan sistem pelayanan perizinan Pemerintah telah menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektornik melalui penerapan Aplikasi *Online Single Submission* (OSS). Penerapan sistem OSS diharapkan dapat mempercepat dan menyederhanakan proses pelayanan perizinan dengan mengurangi proses birokrasi sehingga mempermudah para pelaku usaha untuk mendapatkan izin berusaha di Indonesia.

Digitalisasi sistem pelayanan perizinan melalui penerapan OSS selanjutnya diharapkan mampu meningkatkan iklim investasi di Indonesia yang pada akhirnya dapat mendongkrak daya saing Indonesia. Daya saing suatu daerah merupakan hal yang sangat penting bagi investor untuk menentukan keputusan berinvestasi. Investor cenderung akan memilih daerah yang lingkungan bisnis dengan kebijakan yang ramah, sehingga menjadikan investor menanam investasinya dengan risiko yang dapat dikelola dan terkontrol. Sehingga pada akhirnya dengan perbaikan sistem perizinan diharapkan dapat meningkatkan realisasi investasi khususnya di kota Banda Aceh dan provinsi Aceh.

Namun dalam pelaksanaannya sampai saat ini dirasa masih belum cukup untuk mewujudkan realisasi penanaman modal sesuai dengan yang diharapkan. Hal tersebut karena terdapat beberapa kendala yang dihadapi baik oleh pelaku usaha maupun oleh pemerintah daerah terkait sistem OSS baik dalam regulasi maupun sistemnya. Adapun beberapa isu-isu penting yang perlu menjadi perhatian khusus bagi pemerintah dalam penyelenggaraan perizinan antara lain:

1. Pemerintah perlu segera menerbitkan kebijakan terkait dengan kelembagaan PTSP di daerah, dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri dalam rangka debirokratisasi pelayanan perizinan. Hal ini karena adanya beberapa NSPK sebagai peraturan pelaksanaan PP No. 24 Tahun 2018 dalam mekanisme pelayanannya tidak

mewajibkan prosesnya melalui DPMPTSP tetapi langsung melalui perangkat daerah teknis

2. Mendorong kejelasan, kepastian dan harmonisasi kebijakan terkait penyelenggaraan pelayanan perizinan melalui sistem OSS, baik regulasi maupun sistemnya secara konsisten tidak selalu berubah-ubah;
3. Mendorong pemerintah dalam hal sinergitas antara Kementerian/Lembaga dengan daerah dalam mewujudkan deregulasi pelayanan perizinan baik berupa NSPK ataupun rencana penerbitan omnibuslaw yang sesuai dengan maksud dan tujuan diterbitkannya PP No 24 Tahun 2018 dengan melibatkan pemerintah daerah.
4. Meningkatkan optimalisasi dan sinkronisasi peran perencanaan dan pengembangan potensi penanaman modal dari BKPM terhadap daerah dalam bentuk program dekonsentrasi yang nyata sehingga potensi dan realisasi penanaman modal di daerah dapat dioptimalkan dengan baik.
5. Perlunya fasilitas pelaksanaan Alokasi dana untuk kegiatan yang akan dilaksanakan, peningkatan kualitas sumber daya manusia yang menangani perizinan dan Non Perizinan terlatih, Peningkatan sarana dan prasarana pendukung kegiatan Perizinan dan Non Perizinan.

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional.

Sejalan dengan arah kebijakan nasional, peningkatan inovasi dan kualitas penanaman modal merupakan modal utama untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, berkelanjutan dan mensejahterakan secara adil dan merata.

Visi Presiden dan Wakil Presiden Terpilih Periode 2020 – 2024 yang merupakan tema pembangunan tahun 2020 – 2024, yaitu “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”. Visi Misi Presiden tersebut dijabarkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020 – 2024, sasaran pembangunan jangka menengah tahun 2020 – 2024 adalah mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah.

Ranwal Rencana kerja DPMPTSP kota Banda Aceh Tahun 2024 merupakan tahun kedua dari pelaksanaan Renstra DPMPTSP kota Banda Aceh 2023 - 2026. Mengacu kepada Renstra ini, maka tujuan yang ingin dicapai oleh DPMPTSP kota Banda Aceh selama lima tahun mendatang yaitu “Mengoptimalkan Reformasi Birokrasi dan tata kelola pemerintahan pada penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu”, serta “Pertumbuhan Ekonomi yang Kondusif melalui Kebijakan Penanaman Modal” Sementara itu, sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra DPMPTSP kota Banda Aceh tahun 2023 – 2026 yaitu:

1. Optimalnya Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan pada Penanaman Modal.
2. Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi yang Kondusif melalui Kebijakan Penanaman Modal.

Adapun strategi yang akan dilaksanakan antara lain:

1. Penyederhanaan prosedur Perizinan dan Persyaratan Investasi.
2. Peningkatan Kapasitas SDM secara kuantitas dan kualitas
3. Peningkatan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan sesuai SOP.

4. Optimalisasi Investasi jangka Panjang.

Arah kebijakan DPMPTSP kota Banda Aceh dalam rangka meningkatkan realisasi investasi dan meningkatkan kualitas pelayanan perizinan untuk lima tahun mendatang, antara lain:

1. Penyiapan data dukung Investasi dan Sarpras.
2. Pembenahan Iklim Investasi dan penguatan Pelayanan terpadu satu pintu.

3.3. Program dan Kegiatan.

Program merupakan Kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu dan beberapa instansi pemerintah. Dalam mengimplementasikan perencanaan, pada penjabarannya dilakukan prioritas program dan kegiatan yang akan dilaksanakan.

1. Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan Program dan kegiatan dalam Renja DPMPTSP tahun 2024 adalah sebagai berikut :

a) Pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah.

Pencapaian Visi pembangunan Kota Banda Aceh tahun 2023-2026 tidak terlepas dari memperkuat tata Kelola pemerintahan yang baik, dengan salah satu sasaran yang ingin dicapai adalah Pertumbuhan Ekonomi yang Kondusif melalui kebijakan Penanaman Modal.

Pertumbuhan ekonomi di Banda Aceh yang sangat tinggi terjadi pada tahun 2016, namun perekonomian Kota Banda Aceh mengalami perlambatan dari 6,31 menjadi 3,39. Kemudian pada tahun 2018 mulai membaik atau meningkat 1,1 persen dibandingkan tahun 2017. Hal ini didukung dengan adanya geliat pertumbuhan kegiatan ekonomi pada sector Administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib. Namun pertumbuhan ekonomi Kota Banda Aceh mengalami perlambatan Kembali tahun 2019 dan 2020 akibat dari pandemic Covid-19 yang menghambat berbagai kegiatan ekonomi di Kota Banda Aceh. Seluruh sector mengalami perlambatan yang pada akhirnya menurunkan secara drastis pertumbuhan ekonomi di Kota Banda Aceh. Strategi peningkatan perekonomian Kota Banda Aceh salah satunya dengan Program Pengembangan Iklim dan Promosi Penanaman Modal yang merupakan program kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu.

b) Pencapaian SDG's

Tujuan pembangunan berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDG's) adalah seperangkat target yang berhubungan dengan pengembangan Internasional dimasa mendatang, dibuat oleh perserikatan Bangsa-bangsa dan dipromosikan sebagai tujuan Global untuk pembangunan yang berkelanjutan. SDG's menggantikan MDG's (Tujuan Pembangunan Milenium) yang tidak laku berlaku terhitung mulai akhir 2015. SDG's aktif mulai tahun 2015 hingga 2030.

Kegiatan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam pencapaian SDG's yaitu :

- Terjadi peningkatan pertumbuhan ekonomi yang Inklusif dan berkelanjutan melalui percepatan dan kemudahan dalam mengurus Perizinan berusaha yang terintegritas secara elektronik: Pembinaan, Pendampingan dan Pengawasan bagi para pelaku usaha melalui kegiatan kunjungan lapangan. Bimtek Implementasi pembinaan perizinan berusaha berbasis resiko dan Bimtek Implementasi pengawasan perizinan berusaha berbasis resiko serta kegiatan penyelesaian permasalahan yang dihadapi oleh pelaku usaha.
 - Terjadinya kesempatan kerja yang produktif dan menyeluruh serta pekerjaan yang layak untuk semua., Ditandai dengan jumlah Investor PMDN/PMA tahun 2023 (kondisi TW III) sebanyak 2,696 investor. Dengan nilai realisasi investasi sebanyak Rp. 436.915.815.354
2. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan, antara lain meliputi: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu memiliki tupoksi didalam pencapaian kinerja di bidang Penanaman Modal dan perizinan, program dan kegiatan yang diusulkan pada tahun 2025, yaitu :
1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
 - 1.1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - 1.1.1. Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah.
 - 1.2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - 1.2.1. Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - 1.2.2. Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN.
 - 1.3. Kegiatan Administrasi Pegawai Perangkat Daerah.
 - 1.3.1. Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut kelengkapannya.

- 1.4. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - 1.4.1. Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor.
 - 1.4.2. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor.
 - 1.4.3. Sub kegiatan penyediaan barang cetakan dan penggandaan.
 - 1.4.4. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- 1.5. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.
 - 1.5.1. Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya.
 - 1.5.2. Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.
- 1.6. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.
 - 1.6.1. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik.
 - 1.6.2. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- 1.7. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.
 - 1.7.1. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan , Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan.
 - 1.7.2. Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya.
 - 1.7.3. Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.
2. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal.
 - 2.1. Kegiatan Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanamanm Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota.
 - 2.1.1. Sub Kegiatan Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan.
 - 2.2. Kegiatan Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota.
 - 2.2.2. Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota.
3. Program Promosi Penanaman Modal.
 - 3.1. Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota.

- 3.1.1. Sub Kegiatan Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota.
4. Program Pelayanan Penanaman Modal.
 - 4.1. Kegiatan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten/Kota.
 - 4.1.1. Sub Kegiatan Penyediaan pelayanan perizinan berusaha melalui system perizinan berusaha berbasis risiko terintegrasi secara elektronik.
 - 4.1.2. Sub Kegiatan Penyediaan pengelolaan layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko
5. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal
 - 3.4. Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota.
 - 3.4.1. Penyelesaian permasalahan dan hambatan yang dihadapi pelaku usaha dalam merealisasikan kegiatan usahanya.
 - 3.4.2. Bimbingan teknis kepada pelaku usaha
 - 3.4.3. Pengawasan Penanaman Modal.
6. Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal
 - 6.1. Kegiatan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota.
 - 6.1.1. Sub Kegiatan Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik

Kegiatan lokasi pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu untuk tahun 2025 banyak dilaksanakan di Kampung Baru, Kecamatan Baiturrahman Kota Banda Aceh. Untuk kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal dilaksanakan di beberapa tempat di Kota Banda Aceh. Total Program yang akan dilaksanakan pada tahun 2025 adalah 6 program, 13 kegiatan, dan 24 sub kegiatan, Dengan rencana total jumlah pagu indikatif 2025 mencapai Rp. 8,864,341,476.

2	18	01	2.07		Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemertan pemertahan kebutuhan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Kota Bandar Aceh, Subrahman, Kampong Baro	100	%		67,574,082	PAD		100	%	67,574,082
2	18	01	2.07	0006	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	Kota Bandar Aceh, Subrahman, Kampong Baro	50	Unit		59,537,582	PAD		50	Unit	59,537,582
2	18	01	2.07	0010	Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan	Kota Bandar Aceh, Subrahman, Kampong Baro	1	Unit		8,036,500	PAD		1	Unit	8,036,500
2	18	01	2.08		Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemertan pemertahan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Kota Bandar Aceh, Subrahman, Kampong Baro	100	%		1,577,354,973	PAD		100	%	1,577,354,973
2	18	01	2.08	0002	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah waktu Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air & Listrik	Kota Bandar Aceh, Subrahman, Kampong Baro	12	Bulan		1,190,000,000	PAD		12	Bulan	1,190,000,000
2	18	01	2.08	0004	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah waktu Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Bandar Aceh, Subrahman, Kampong Baro	12	Bulan		187,354,973	PAD		12	Bulan	187,354,973
2	18	01	2.09		Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemertan pemertahan kebutuhan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Kota Bandar Aceh, Subrahman, Kampong Baro	100	%		131,085,689	PAD		100	%	131,085,689
2	18	01	2.09	0002	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Pemeliharaan, Pemayaran Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Bandar Aceh, Subrahman, Kampong Baro	7	Unit		43,670,000	PAD		7	Unit	43,670,000
2	18	01	2.09	0006	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	Kota Bandar Aceh, Subrahman, Kampong Baro	59	Unit		69,389,474	PAD		59	Unit	69,389,474
2	18	01	2.09	0010	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dilaksanakan	Kota Bandar Aceh, Subrahman, Kampong Baro	32	Unit		18,806,465	PAD		32	Unit	18,806,465
2	18	02			Program Pengembangan Hilir Penanaman Modal	Pemertan Pengembangan Hilir Penanaman Modal	Kota Bandar Aceh	100	%		37,000,000	PAD		100	%	37,000,000
2	18	02	2.01		Kegiatan Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dalam Penanaman Modal yang Mengalir Keuraungan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dalam Penanaman Modal	Kota Bandar Aceh	100	%		20,000,000	PAD		100	%	20,000,000
2	18	02	2.01	0001	Sub Kegiatan Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Penetapan kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Kota Bandar Aceh	1	Dokumen		20,000,000	PAD		1	Dokumen	20,000,000
2	18	02	2.02		Kegiatan Pembentukan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Jumlah Pembentukan Peta Potensi Penanaman Modal	Kota Bandar Aceh	100	%		17,000,000	PAD		100	%	17,000,000
2	18	02	2.02	0001	Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota yang disusun	Kota Bandar Aceh	1	Dokumen		17,000,000	PAD		1	Dokumen	17,000,000

2	18	03		Program Promosi Penanaman Modal	Persentase Promosi Penanaman Modal	Kota Banda Aceh	100	%	48.123,000	PAD		100	%	48.123,000
2	18	03	2.01	Kegiatan Penyelenggaraan Proses Penanaman Modal yang Mengalir Kemungkinan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal	Kota Banda Aceh	1	Laporan	48.123,000	PAD		100	%	48.123,000
2	18	03	2.01	0002 Sub Kegiatan Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kelulusan Peneran Investasi	Kota Banda Aceh	1	Kali	48.123,000	PAD		1	Dokumen	48.123,000
2	18	04		Program Pelayanan Penanaman Modal	Persentase Tingkat kepuasan Masyarakat	Kota Banda Aceh	100	%	130.118,164	PAD		100	%	130.118,164
2	18	04	2.01	Kegiatan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal yang mengalir kemungkinan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan secara Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal	Kota Banda Aceh	2	Laporan	130.118,164	PAD		100	%	130.118,164
2	18	04	2.01	0006 Sub Kegiatan Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Pengawasan Tempat Usaha yang Memiliki izin usaha	Kota Banda Aceh	200	Pelaku Usaha	75.298,164	PAD		200	Pelaku Usaha	75.298,164
2	18	04	2.01	0007 Sub Kegiatan Penyediaan dan Pengelolaan Pengaduan Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	Jumlah masyarakat yang Dilayani untuk Konsultasi/Pengaduan yang Ditindaklanjuti	Kota Banda Aceh	500	Masyarakat	54.820,000	PAD		500	Masyarakat	54.820,000
2	18	05		Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Persentase Nilai Penanaman Modal	Kota Banda Aceh	100	%	433.394,000	DAK		100	%	433.394,000
2	18	05	2.01	Kegiatan Penyelenggaraan Pelaksanaan Penanaman Modal yang mengalir kemungkinan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Pelaksanaan Penanaman Modal	Kota Banda Aceh	100	%	433.394,000	DAK		100	%	433.394,000
2	18	05	2.01	0004 Sub Kegiatan Penyelenggaraan Pemastanahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan kegiatan usahanya.	Jumlah Laporan pemantauan	Kota Banda Aceh	10	Kegiatan Usaha	40.000,000	DAK		10	Kegiatan Usaha	40.000,000
2	18	05	2.01	0005 Sub Kegiatan Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha.	Jumlah Laporan pelaku usaha yang telah mendapatkan pembinaan	Kota Banda Aceh	250	Pelaku Usaha	373.815,200	DAK		250	Pelaku Usaha	373.815,200
2	18	05	2.01	0006 Sub Kegiatan Pengawasan Penanaman Modal.	Jumlah laporan Pelaksanaan pengawasan Penanaman Modal	Kota Banda Aceh	30	Kegiatan Usaha	19.578,800	DAK		30	Kegiatan Usaha	19.578,800
2	18	06		Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Persentase Peningkatan Sistem Informasi Penanaman Modal	Kota Banda Aceh	100	%	157.600,000	PAD		100	%	157.600,000
2	18	06	2.01	Kegiatan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sistem Informasi Perizinan Berbasis Elektronik yang Terintegrasi dengan Sistem Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	Kota Banda Aceh	100	%	157.600,000	PAD		100	%	157.600,000
2	18	06	2.01	0002 Sub Kegiatan Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Sistem Informasi Perizinan Berbasis Elektronik yang Terintegrasi dengan Sistem Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	Kota Banda Aceh	1	Dokumen	157.600,000	PAD		1	Dokumen	157.600,000

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Perumusan program dan kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banda Aceh Tahun 2025 mengacu kepada Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2023 -2026, Rancangan Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Pemerintah kota Banda Aceh dan Hasil evaluasi Renja DPMPTSP kota Banda Aceh Tahun 2023. Mengacu pada dokumen tersebut DPMPTSP kota Banda Aceh telah merumuskan 6 (enam) program, 13 (tiga belas) kegiatan dan 24 (Dua Puluh empat) Sub Kegiatan, beserta kerangka pendanaan indikatif. Melalui pelaksanaan program dan kegiatan tersebut diharapkan dapat mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah DPMPTSP kota Banda Aceh yaitu “Mengoptimalkan Reformasi Birokrasi dan tata Kelola pemerintahan pada penanaman modal dan pelayanan Terpadu Satu Pintu”, dengan sasaran Optimalnya Reformasi Birokrasi dan tata Kelola Pemerintahan pada penanaman modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Dan tujuan “Pertumbuhan Ekonomi yang kondusif melalui kebijakan Penanaman Modal” dengan sasaran jangka menengah Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi yang kondusif melalui kebijakan Penanaman Modal.

1. Program

DPMPTSP kota Banda Aceh dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi maka disusunlah program, kegiatan, dan sub kegiatan kerja dengan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah dan Keuangan Daerah, yang dimutakhirkan dengan keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5 – 1317 Tahun 2023 Tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, VALIDasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenkelatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Adapun kegiatan unggulan/prioritas DPMTSPSP kota Banda Aceh tahun 2025, antara lain :

- 1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota;
- 2) Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal;
- 3) Program Promosi Penanaman Modal;
- 4) Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal;
- 5) Program Pelayanan Penanaman Modal;
- 6) Program pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal;

2. Kegiatan.

Sesuai dengan kebijakan program yang telah ditetapkan bersama, maka perlu ditetapkan beberapa kegiatan untuk menunjang program – program yang telah ada. Untuk merealisasikan program – program diatas, ditetapkan kegiatan – kegiatan yang akan dilaksanakan antara lain:

- 1) Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- 2) Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
- 3) Kegiatan Administrasi Pegawai Perangkat Daerah.
- 4) Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
- 5) Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.
- 6) Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.
- 7) Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.
- 8) Kegiatan Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibiidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota.
- 9) Kegiatan Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota.
- 10) Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota.
- 11) Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota.
- 12) Kegiatan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
- 13) Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
- 14) Kegiatan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota.

3. Sub Kegiatan

Sub Kegiatan merupakan bentuk penjabaran lebih lanjut atau prnerjemahan dari aktivitas atau layanan kegiatan di dalam pelaksanaan kewenangan daerah dengan ketentuan perundang – undangan yang berlaku.

Untuk merealisasikan kegiatan – kegiatan diatas, ditetapkan sub kegiatan – sub kegiatan yanag dilaksanakan antara lain:

- 1) Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

- 2) Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- 3) Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
- 4) Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut kelengkapannya
- 5) Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
- 6) Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor
- 7) Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
- 8) Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- 9) Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- 10) Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- 11) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- 12) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- 13) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan , Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
- 14) Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- 15) Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- 16) Sub Kegiatan Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal
- 17) Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota
- 18) Sub Kegiatan Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota
- 19) Sub Kegiatan Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha Melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
- 20) Sub Kegiatan Penyediaan dan Pengelolaan Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
- 21) Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi pelaku usaha dalam merealisasikan kegiatan usahanya
- 22) Bimbingan Teknis Kepada Pelaku Usaha
- 23) Pengawasan Penanaman Modal

- 24) Sub Kegiatan Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik.

Tabel 4.1
Rencana Kerja, Pendanaan dan Kelompok Sasaran Tahun 2025

Kode					Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Target		Pagu	Kelompok Sasaran
								Volume	Setoran		
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
2	18				Urutan Pemeliharaan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan Dasar					8,864,942,476	
2	18	01			DPNMTSP						
2	18	01			Program Penunjang Urutan Pemeliharaan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang perangkat daerah	DPNMTSP	100	%	8,086,106,112	DPNMTSP
2	18	01	2.01		Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi OPD yang tertanam	DPNMTSP Kota Banda Aceh	300	%	4,940,123	DPNMTSP
2	18	01	2.01	0001	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan yang disusun	DPNMTSP Kota Banda Aceh	3	Dokumen	4,940,123	DPNMTSP
2	18	01	2.02		Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi keuangan	DPNMTSP Kota Banda Aceh	300	%	6,385,546,118	Pegawai DPNMTSP
2	18	01	2.02	0001	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah waktu pembayaran gaji dan tunjangan ASN yang disediakan	DPNMTSP Kota Banda Aceh	12	Bulan	5,378,873,118	Pegawai DPNMTSP
2	18	01	2.02	0002	Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah waktu Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/ Teknis Perkantoran yang disediakan	DPNMTSP Kota Banda Aceh	1	Dokumen	906,675,000	Pegawai DPNMTSP
2	18	01	2.03		Kegiatan Administrasi Pengawasan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	DPNMTSP Kota Banda Aceh	300	%	43,835,000	Pegawai DPNMTSP
2	18	01	2.03	0002	Sub Kegiatan Pengadaan Pakelan Dinas beserta Atribut kelengkapannya	Jumlah Pakelan Dinas beserta Perlengkapannya yang disediakan	DPNMTSP Kota Banda Aceh	0	Staf	43,835,000	Pegawai DPNMTSP
2	18	01	2.04		Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang administrasi umum	DPNMTSP Kota Banda Aceh	300	%	146,988,077	DPNMTSP
2	18	01	2.04	0001	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah jenis komponen instalasi listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	DPNMTSP Kota Banda Aceh	3	Jenis	3,463,853	DPNMTSP
2	18	01	2.04	0004	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah jenis Bahan Logistik Kantor yang disediakan	DPNMTSP Kota Banda Aceh	6	Jenis	17,367,638	Masyarakat dan Pegawai DPNMTSP
2	18	01	2.04	0005	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah jenis Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	DPNMTSP Kota Banda Aceh	16	Jenis	76,156,586	DPNMTSP
2	18	01	2.04	0009	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah yang dilaksanakan	DPNMTSP Kota Banda Aceh	24	Laporan	50,000,000	DPNMTSP
2	18	01	2.07		Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urutan Pemeliharaan Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan Barang Milik Daerah Penunjang Urutan Pemeliharaan Daerah	DPNMTSP Kota Banda Aceh	300	%	67,574,082	DPNMTSP
2	18	01	2.07	0006	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	DPNMTSP Kota Banda Aceh	50	Unit	59,537,582	DPNMTSP
2	18	01	2.07	0010	Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan	DPNMTSP Kota Banda Aceh	1	Unit	8,036,500	DPNMTSP
2	18	01	2.08		Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urutan Pemeliharaan Daerah	Persentase pemenuhan Penyediaan Jasa Penunjang Urutan Pemeliharaan Daerah	DPNMTSP Kota Banda Aceh	100	%	1,377,354,979	DPNMTSP
2	18	01	2.08	0002	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah waktu Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air & Listrik	DPNMTSP Kota Banda Aceh	12	Bulan	1,190,000,000	DPNMTSP
2	18	01	2.08	0004	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah waktu Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	DPNMTSP Kota Banda Aceh	12	Bulan	187,354,979	DPNMTSP

2	18	01	2.09		Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	DPMPTSP Kota Banda Aceh	100	%	131,865,939	DPMPTSP
2	18	01	2.09	0002	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Pemeliharaan, Pembayaran Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	DPMPTSP Kota Banda Aceh	7	Unit	43,670,000	DPMPTSP
2	18	01	2.09	0006	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	DPMPTSP Kota Banda Aceh	53	Unit	69,389,474	DPMPTSP
2	18	01	2.09	0010	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dilaksanakan	DPMPTSP Kota Banda Aceh	32	Unit	18,806,465	DPMPTSP
2	18	02			Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Persentase Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Banda Aceh	100	%	97,000,000	Aparatur, masyarakat dan investor
2	18	02	2.01		Kegiatan Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal	Banda Aceh	100	%	20,000,000	Aparatur dan masyarakat
2	18	02	2.01	0001	Sub Kegiatan Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Banda Aceh	1	Dokumen	20,000,000	Aparatur dan masyarakat
2	18	02	2.02		Kegiatan Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Jumlah Pembuatan Peta Potensi Penanaman Modal	Banda Aceh	100	%	17,000,000	Aparatur dan investor
2	18	02	2.02	0001	Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota yang dikeluarkan	Banda Aceh	1	Dokumen	17,000,000	Aparatur dan investor
2	18	03			Program Promosi Penanaman Modal	Persentase Promosi Penanaman Modal	Banda Aceh	100	%	48,123,000	Investor
2	18	03	2.01		Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal	Banda Aceh	100	%	48,123,000	Investor
2	18	03	2.01	0002	Sub Kegiatan Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Keikutsertaan Pameran investasi	Banda Aceh	1	Kali	48,123,000	Investor
2	18	04			Program Pelayanan Penanaman Modal	Persentase Tingkat Kepuasan Masyarakat	Banda Aceh	100	%	130,118,164	Pelaku Usaha dan Masyarakat
2	18	04	2.01		Kegiatan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Secara Terpadu Satu Pintu Dibidang Penanaman Modal	Banda Aceh	100	%	130,118,164	Pelaku Usaha dan Masyarakat
2	18	04	2.01	0006	Sub Kegiatan Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Pengawasan Tempat Usaha yang Memiliki Izin usaha	Banda Aceh	200	Pelaku Usaha	75,298,164	Pelaku Usaha
2	18	04	2.01	0007	Sub Kegiatan Penyediaan dan Pengelolaan Pengaduan layanan Konsultasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	Jumlah masyarakat yang Dilayani untuk Konsultasi/Pengaduan yang Ditindaklanjuti	Banda Aceh	500	Masyarakat	54,820,000	Masyarakat

2	18	05		Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Persentase Nilai Penanaman Modal	Banda Aceh	100	%	433,394,000	Investor
2	18	05	2.01	Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Banda Aceh	100	%	433,394,000	Investor
2	18	05	2.01	0004 Sub Kegiatan Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya.	Jumlah Laporan pemantauan	Banda Aceh	1	Laporan	40,000,000	Investor
2	18	05	2.01	0005 Sub Kegiatan Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha.	Jumlah Laporan pelaku usaha yang telah mendapatkan pembinaan	Banda Aceh	1	Laporan	373,815,200	Investor
2	18	05	2.01	0006 Sub Kegiatan Pengawasan Penanaman Modal.	Jumlah laporan Pelaksanaan pengawasan Penanaman Modal	Banda Aceh	1	Laporan	19,578,800	Investor
2	18	06		Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Persentase Peningkatan Sistem Informasi Penanaman Modal	Banda Aceh	100	%	157,600,000	Pelaku Usaha
2	18	06	2.01	Kegiatan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sistem Informasi Perizinan Berbasis Elektronik yang Terintegrasi dengan Sistem Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	Banda Aceh	100	%	157,600,000	Pelaku Usaha
2	18	06	2.01	0002 Sub Kegiatan Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Sistem Informasi Perizinan Berbasis Elektronik yang Terintegrasi dengan Sistem Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	Banda Aceh		Dokumen	157,600,000	Pelaku Usaha

BAB. V

PENUTUP

Dokumen Rancangan Awal Renja DPMPTSP kota Banda Aceh Tahun 2025 merupakan dokumen perencanaan tahunan yang digunakan sebagai landasan operasional program dan kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banda Aceh. Rencana kerja lebih memusatkan seluruh perencanaan Pembangunan urusan Pemerintahan bidang Penanaman Modal untuk mendukung arah Pembangunan Daerah, selain itu juga dalam rangka menunjang keberhasilan strategis daerah Kota Banda Aceh. Dalam rangka menjamin terlaksananya kegiatan-kegiatan tersebut serta untuk terwujudnya sinergitas kinerja pembangunan diantara semua pihak yang terkait, maka seluruh Bidang dan Sekretariat pada DPMPTSP kota Banda Aceh, berkewajiban untuk melaksanakan program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Rancangan Awal Renja DPMPTSP kota Banda Aceh Tahun 2025, secara sinergitas dan terintegrasi.

Sebagai langkah awal dalam menyusun RAPBK Tahun 2025, Rancangan Awal Renja DPMPTSP kota Banda Aceh Tahun 2025 dijabarkan lebih lanjut dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahun 2025. Guna menjamin konsistensi, sinergitas, harmonisasi, integrasi, efektivitas dan efisiensi pelaksanaan pembangunan, setiap Bidang di lingkungan DPMPTSP kota Banda Aceh wajib melakukan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan Renja Tahun 2025, sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing dan melakukan koreksi yang diperlukan serta melaporkan hasilnya secara berkala setiap 3 (tiga) bulan kepada Kepala Dinas, Langkah-langkah persiapan dimulai sejak tanggal ditetapkan hingga pelaksanaannya, perlu terus dilakukan dengan memperhatikan dan menerapkan prinsip-prinsip koordinasi, sinkronisasi, sinergitas, harmonisasi, efektivitas dan efisiensi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

Banda Aceh, 24 November 2023
Plt. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu



Andri, S.STP., M.Si
Pembina / NIP. 19840323 200212 1 002